

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengganggu kemampuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Perkembangan aktivitas bisnis mengalami pergeseran paradigma dimana motif awalnya hanyalah *profit* berkembang untuk melakukan aktivitas yang mengacu pada konsep *sustainable development* yakni 3P (*profit people* dan *planet*). Pembahasan agenda pembangunan berkelanjutan juga diperkenalkan oleh PBB melalui agenda global pembangunan keberlanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tahun 2015 yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dicapai pada 2030 (UN 2015). Kesepakatan yang disetujui oleh negara anggota termasuk Indonesia tersebut menghimbau seluruh dunia untuk mempraktekkan dan melakukan aktivitas produksi dengan memperhatikan unsur keberlanjutan.

Himbauan melakukan produksi secara berkelanjutan disambut positif oleh pihak konsumen sehingga menciptakan iklim produksi yang baru untuk mendukung memproduksi barang yang memiliki jaminan keberlanjutan. Menindak lanjuti tuntutan konsumen hingga tahun 2012 terdapat 435 produk yang arah perkembangan produk berkelanjutan (COSA 2013). Sektor pertanian sebagai aktivitas produksi di Indonesia juga menjadi sasaran penerapan praktik-praktik berkelanjutan. Mekanisme agribisnis harus diciptakan sedemikian rupa untuk menciptakan iklim bisnis yang mampu diterima sehingga produk pertanian tidak kehilangan pasar. Salah satu komoditas pertanian yang sering mendapat perhatian

terhadap pemenuhan kriteria keberlanjutan oleh konsumen adalah produk kelapa sawit.

Meskipun memiliki peran yang strategis bagi perekonomian nasional, perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Dampak negatif tersebut memunculkan penolakan berbagai kalangan terhadap pengembangannya di Indonesia. Berbagai pihak menuntut agar perkebunan kelapa sawit dikembangkan secara *sustainable* (berkelanjutan) sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan penerapan dari konsep pertanian berkelanjutan, yaitu sistem pertanian yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tuntutan tersebut direspons melalui penerapan standar ISPO dan RSPO dalam perkebunan kelapa sawit. Namun, sejauh ini masih banyak perkebunan yang belum berkelanjutan sehingga dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit masih dirasakan di berbagai daerah. Bencana asap sebagai dampak kebakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit, penggunaan pekerja anak, konflik lahan, dan rendahnya kesejahteraan tenaga kerja merupakan implikasi dari perkebunan yang tidak berkelanjutan (Shalahuddin, Muchtar, & Musla, 2011; Ngadi, 2015).

Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama yang memiliki manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dimulai pada Tahun 1969 dimulai ketika pemerintah Indonesia membentuk perusahaan negara perkebunan (PNP) dengan awal pendanaan investasi oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan Bank Pembangunan Asia (*The Asian Development Bank*). Sejak awal pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 1970-an Perkebunan

kelapa sawit masih didominasi oleh perkebunan besar baik swasta maupun negara. Dilihat dari pertumbuhan rata-rata perkebunan kelapa sawit sebesar 10,99% pada periode 1998-2016. Pada Tahun 1980 luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia sebesar 29.456 ribu hektar maka pada Tahun 2015 telah mencapai 11.30juta hektar. Pertumbuhan produksi mengikuti luas areal kelapa sawit sebesar 11.50 persen (Kementerian Pertanian 2017). Tahap perkembangan perkebunan kelapa sawit mengalami pergeseran dimana pada perkebunan rakyat telah mendominasi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 41 persen dari luas keseluruhan kebun kelapa sawit di Indonesia dengan jumlah pekebun yang terlibat mencapai 22 juta (Ditjenbun 2014).

Provinsi Sumatera utara termasuk 4 besar provinsi produsen kelapa sawit Indonesia ditinjau dari luas dan produksinya. Perkebunan kelapa sawit berkembang pesat era 1980 - 1990 dimana terjadi fenomena transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang sebagian besar penduduk mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas penopang perekonomian keluarga. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara diusahakan secara mandiri maupun bermitra perusahaan. Supriadi (2013) menyatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Utara secara ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dilihat dari pertumbuhan

sebelum dan sesudah perkebunan kelapa sawit berkembang. Luas perkebunan kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kepemilikan didominasi perkebunan rakyat sementara perkembangan perkebunan negara cenderung stabil namun perkebunan rakyat cenderung meningkat. Berdasarkan data (BPS, 2018) sekitar 75 persen perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan penguasaan adalah perkebunan kelapa sawit rakyat. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Di Sumatera Utara pada Tahun 2021 lebih dari 1.285,8 Ha , Luas Perkebunan kelapa sawit milik negara pada tahun 2022 lebih dari 286.895,04 Ha, Luas Perkebunan kelapa sawit milik swasta pada tahun 2020 lebih dari 628.586 Ha, Luas Perkebunan kelapa sawit milik rakyat pada tahun 2021 lebih dari 442.072,76 Ha. jumlah ini akan semakin bertambah dengan melihat antusias masyarakat terhadap bisnis perkebunan kelapa sawit.

Kecamatan Sei Rampah merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Luas areal budidaya kelapa sawit di Kecamatan Sei Rampah bertambah setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya lahan yang dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit (BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2015).

Tabel 1. Luas Lahan (Ha) Dan Produksi (Ton) Tanaman Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Sei Rampah Tahun 2021-2023

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)			Produksi (Ton)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sei Rampah	850,20	887,77	938,50	13.229,55	13.229,55	13.075,18

Sumber: BPS Serdang Bedagai

Perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan bagian dari rantai pasok agribisnis kelapa sawit yang perlahan dituntut untuk menerapkan aspek

keberlanjutan. Sertifikasi keberlanjutan seakan menjadi kewajiban untuk memasuki pasar sementara posisi perkebunan yang tidak memiliki kemampuan manajerial menjadi keterbatasan bagi petani. Pemenuhan aspek keberlanjutan terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat bukan hal yang mudah karena motif ekonomi masih mendominasi dalam praktik budidaya perkebunan kelapa sawit rakyat namun hal ini tidak menjadi alasan bagi pihak pengambil kebijakan untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan. Wujud dari pemenuhan aspek berkelanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat. namun menjadi awal untuk mendorong petani untuk melakukan kegiatan perkebunan yang memenuhi aspek keberlanjutan maka diperlukan analisis status keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat Di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Bagaimana indikator kunci keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat Di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat Di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Untuk menganalisis indikator kunci keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi petani di harapkan mampu menggambarkan kondisi terkini keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat Desa Simpang Empat.
2. Bagi pengambil keputusan sebagai pengambilan kebijakan dan evaluasi oleh pemerintah maupun swasta.
3. Bagi peneliti juga di harapkan mampu menggambarkan perbedaan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) berasal dari Afrika Barat. Tetapi ada sebagian berpendapat justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. Hal ini karena spesies kelapa sawit banyak ditemukan di daerah hutan Brazil dibandingkan Amerika. Pada kenyataannya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Bahkan, mampu memberikan hasil produksi perhektar yang lebih tinggi (Fauzi, Widyastuti, Satyawibawa, Paeru, 2012).

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Maritius dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Haller, seorang berkebangsaan Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatra (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya saat itu sebesar 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton (Fauzi, *dkk.*, 2012).

Klasifikasi tanaman kelapa sawit menurut pahan (2010) adalah sebagai berikut:

Divisi : Embryophyta Shiponagama

Kelas : Angiospermae

Ordo : Monocotyledonae

Famili : Arecaceae

Subfamili : Cocoideae

Genus : *Elaeis*

Spesies : *Elaeis guineensis Jacq*

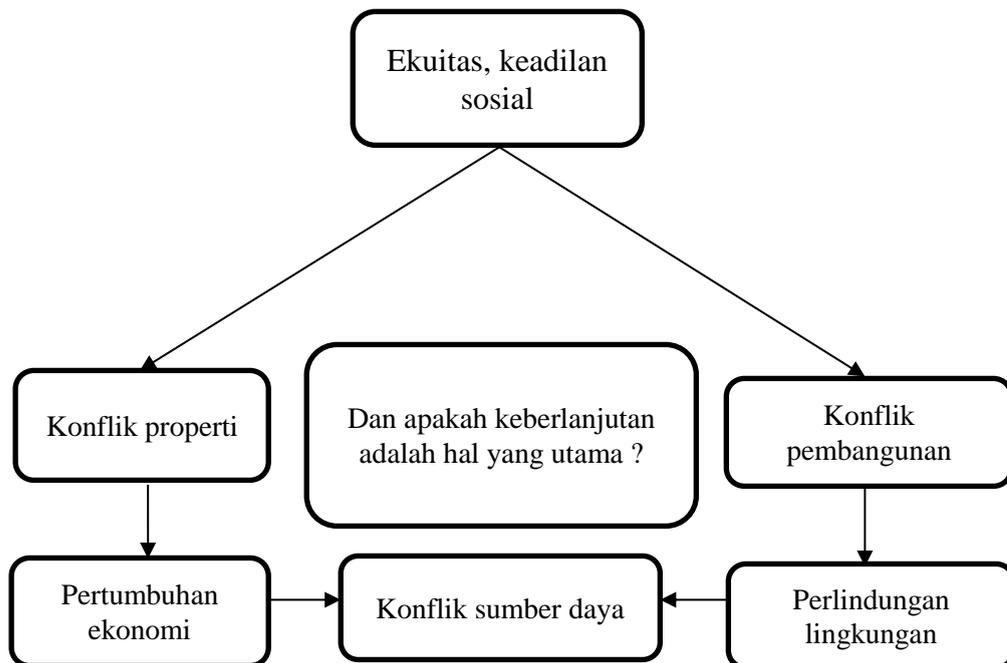
2.2 Konsep Keberlanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Hampir seluruh negara kemudian menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai jargon pembangunannya. Akhir-akhir ini popularitas konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mengemuka dengan digadag-gadangnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pengganti dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan berakhir pada 2015.

Konsep pembangunan berkelanjutan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas sehingga diperlukan formula yang tepat untuk mengintegrasikan antara alam atau lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai wadah untuk berinteraksi. Perubahan arah pembangunan juga berdampak pada arus bisnis dimana motif bisnis

sudah menjadi 3P (profit, people, dan planet) yang bermakna memperhatikan unsur keberlanjutan. Komoditas kelapa sawit menjadi komoditas andalan bagi perekonomian Indonesia juga mengalami tuntutan produksi berkelanjutan. Keberlanjutan komoditas kelapa sawit meliputi seluruh rantai pasok, mulai dari kebun hingga pabrik.

Konsep pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan pemikiran yang baru. Fauzi (2004) menuliskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri memang baru muncul beberapa dekade yang lalu walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* yang dalam kesimpulannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*). Pada pembuatan wilayah yang berkelanjutan Campbell (1996) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga elemen yang harus diperhatikan yakni keadilan sosial permasalahan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang digambarkan pada (Gambar 1).



Gambar 1. Model Pembangunan Berkelanjutan Campbell (1996) dalam Nurmalina^a (2008)

Pemenuhan keberlanjutan dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial ekonomi dan lingkungan bagi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Menurut Heal dalam Fauzi (2004) konsep keberlanjutan paling tidak mengandung dua dimensi yaitu pertama dimensi waktu karena keberlanjutan pasti menyangkut apa yang terjadi di masa mendatang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumberdaya alam dan lingkungan. Pezzey (1992) melihat keberlanjutan dari sisi yang berbeda yaitu melihat dari pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan statik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan sementara keberlanjutan dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multi dimensi dan multi-interpretasi maka terdapat dua hal yang secara implisit menjadi perhatian yaitu pertama menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumberdaya alam dan lingkungan terhadap pola

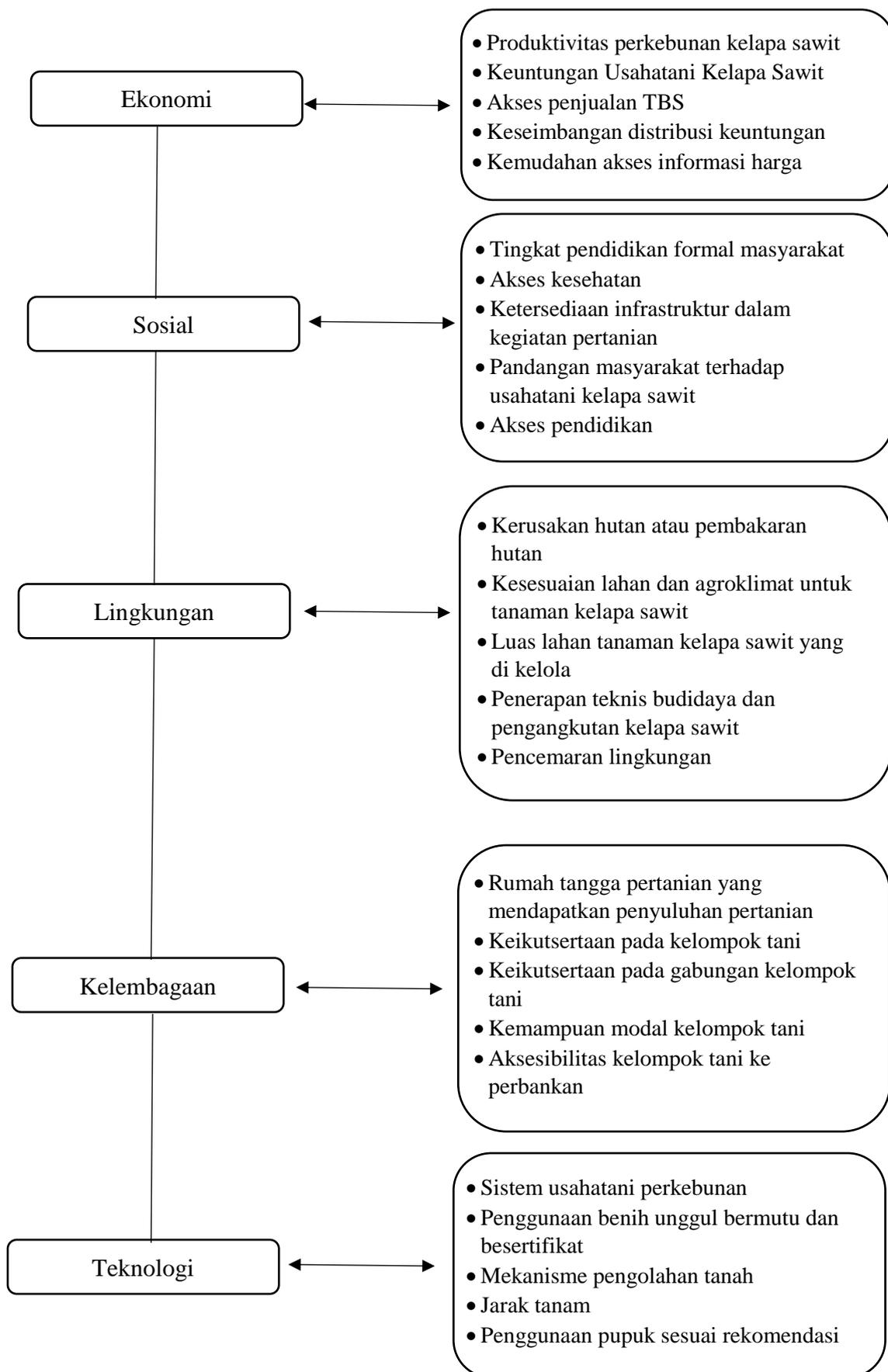
pembangunan dan konsumsi. Kedua menyangkut perhatian terhadap kesejahteraan (*well being*) generasi mendatang. Dengan demikian prinsip pembangunan berkelanjutan dihasilkan dengan memperhatikan 4 aksioma yaitu: (a) perlakukan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang (b) menyadari bahwa aset lingkungan menempatkan nilai positif dalam jangka panjang (c) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic wellbeing* dan (d) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut pada penelitian Kospa (2016) tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan setidaknya dapat dicapai dengan memecahkan permasalahan yang terjadi pada aspek ekonomi sosial-politik dan lingkungan. Konsep agribisnis kemitraan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat berkelanjutan jika memenuhi tiga aspek pengelolaan berkelanjutan. Dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari segi sosial dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pendistribusian secara merata hasil kelapa sawit dan dari segi lingkungan dapat terjaga dan berkelanjutan karena kerjasama yang sinergis antara pemerintah swasta dan masyarakat.

2.3 Indikator Pertanian Berkelanjutan

Pemilihan indikator yang efektif adalah kunci keberhasilan dari setiap evaluasi keberlanjutan. Indikator keberlanjutan semakin dianggap sebagai alat penting dalam menilai dan melaksanakan sistem yang berkelanjutan. Konsep keberlanjutan pertanian adalah suatu hal yang dinamis apa yang dipandang berkelanjutan di suatu wilayah mungkin tidak berkelanjutan di wilayah lainnya dan apa yang dipandang berkelanjutan pada suatu waktu mungkin tidak berkelanjutan di

masa yang akan datang karena perubahan kondisi. Keberlanjutan juga bervariasi terkait dengan faktor sosio-budaya ekonomi dan politik. Prioritas keberlanjutan masing-masing dimensi (dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan dan teknologi) bisa berbeda untuk masing-masing karakteristik spasial dan temporal. Dale dan Beyeler (2001) telah mengemukakan kriteria dalam memilih indikator keberlanjutan pertanian di negara berkembang secara jelas dari masing-masing dimensi atau aspek (ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan teknologi). Hal tersebut diuraikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Indikator Operasional Untuk Mengukur Keberlanjutan Pertanian Di Negara Berkembang

Menurut Zhen dan Routrey (2003) pemilihan suatu indikator operasional keberlanjutan (termasuk pertanian berkelanjutan) dan aplikasinya harus spesifik waktu dan ruang terkait dengan karakteristik spasial (nasional regional lokal) dan temporal (jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang).

Tabel 2. Pemilihan indikator keberlanjutan pertanian di negara berkembang

Temporal			
Spasial	Jangka Pendek(1-5 th)	Jangka Menengah(5-10th)	Jangka Panjang(10-20 th)
Nasional	1 > 2 > 3	3 > 1 = 2	1 = 2 = 3
Regional (Provinsi/negarabagian)	1 > 2 > 3	3 > 1 = 2	1 = 2 = 3
Lokal (Kabupaten/Kecamatan)	1 > 2 > 3	1 > 2 = 3	1 = 2 = 3

Sumber: Zhen dan Routray (2003)

Keterangan:

1 = Keberlanjutan ekonomi

2 = Keberlanjutan sosial dan

3 = Keberlanjutan ekologi

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan dalam jangka pendek pemilihan indikator keberlanjutan pada level nasional regional dan lokal di negara berkembang pertama yang harus di pertimbangkan adalah keberlanjutan ekonomi kemudian keberlanjutan social dan selanjutnya keberlanjutan lingkungan. Umumnya tujuan utama petanian di negara berkembang adalah produksi dan menjaga mata pencaharian dalam jangka pendek. Untuk pembangunan jangka menengah pemilihan indikator pada level nasional dan regional pertama kali harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan selanjutnya memberikan prioritas yang sama bagi keberlanjutan sosial dan ekonomi. Perbedaan

antara level lokal dengan nasional dan regional adalah pada pemilihan indikator pertama kali harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan selanjutnya memberikan prioritas yang sama bagi aspek sosial dan ekologis. Peningkatan manfaat ekonomi masih menjadi tujuan utama bagi negara-negara berkembang terutama di level lokal (kabupaten dan kecamatan). Untuk pembangunan jangka panjang pemilihan indikator pada berbagai level (nasional regional dan lokal) harus memberikan perhatian yang sama untuk ketiga dimensi keberlanjutan tersebut (ekonomi sosial dan lingkungan).

Konsep pertanian berkelanjutan terus berkembang diperkaya dan dipertajam dengan kajian model metode dan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu sehingga menjadi suatu kajian ilmu terapan yang bermanfaat bagi kehidupan generasi yang akan datang. Selain dari tiga aspek pembangunan berkelanjutan terdapat juga beberapa hal lain yang menjadi indikator keberlanjutan pertanian pada umumnya. secara kompleks Zamora (1995) dalam Salikin (1997) menyatakan bahwa indikator keberlanjutan pertanian terdiri dari:

1. Kesadaran lingkungan (*ecologically sound*)

Sistem pertanian haruslah menjaga keseimbangan lingkungan demi keharmonisan sistem ekologi alam yang terbentuk secara alami. Pelanggaran dan pemanfaatan alam yang tidak seimbang hanya akan merusak alam dan meyebabkan ketidak seimbangan sistem ekologi yang merugikan makhluk hidup juga manusia.

2. Bernilai ekonomis (*economic valuable*)

Sistem pertanian memiliki motif ekonomi yang menciptakan keuntungan bagi petani. Motif ekonomi juga harus disandingkan dengan kesadaran terhadap jangka panjang dengan tidak melakukan hal-hal yang mendongkrak keuntungan

namun merugikan pada masa yang akan datang.

3. Berwatak sosial atau kemasyarakatan (*socially just*)

Sistem pertanian secara sosial harus mampu diterima disetiap unsur yang melengkapinya baik individu petani anggota masyarakat dan sistem lainnya. Sistem pertanian secara sosial juga menjamin bahwa aktivitas pertanian tidak melanggar norma yang berlaku. Selain itu fungsi dari sistem sosial adalah menjamin bahwa aktivitas pertanian mampu meningkatkan mobilitas masyarakat.

4. Kepantasan secara budaya (*culturally appropriate*)

Sistem pertanian juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku keyakinan agama dan tradisi.

5. Pendekatan sistem holistik (*systems and holistic approach*)

Sistem pertanian haruslah didasari dengan keilmuan sebagai pendekatan holistik yang memperhatikan unsur-unsur biofisik sosial ekonomi budaya dan politik. Keilmuan akan membantu petani dalam meintegrasikan kegiatan *on farm* dan kegiatan diluar pertanian *off farm* serta aktivitas lain.

Kepentingan pembangunan pertanian berkelanjutan telah menjadi perhatian pada ahli dan pengambil kebijakan hingga konsep pembangunan berkelanjutan digerakkan. Perhatian ini disertai dengan upaya untuk membangun sistem yang bermanfaat untuk mengukur keberlanjutan. Tahapan mendasar dalam meformulasikan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan adalah menemukan indikator kuantitatif untuk mengetahui dengan tepat kondisi perubahan dan mengetahui apakah pembangunan meningkat atau menurun.

2.4 Keberlanjutan Kelapa Sawit

PASPI (2018) menyatakan bahwa industri sawit berperan penting dalam tujuan SDGS-1, SDGs-3 dan SDGs-4 sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan dunia yakni secara empiris pembangunan daerah tersebut dengan menciptakan kesempatan kerja peningkatan pendapatan petani pengurangan kemiskinan serta adanya efek-multiplier-nya terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya dipedesaan dan perkotaan. Memposisikan industri sawit sebagai aktor SDGs selain secara *built-in* dapat meningkatkan keberterimaan industri sawit secara internasional karena kontribusinya pada SDGs yang telah diakui sebagai norma global (*global value*) baru. Industri minyak sawit juga menjadi industri primadona nasional karena minyak goreng merupakan termasuk makan pokok masyarakat Indonesia karena menjadi sumber vitamin dan asam lemak bagi tubuh manusia.

Guan (2013) pada penelitian *Sustainability in the Malaysia palm oil industry* menyatakan bahwa pemberian *eco-labeling* pada produk minyak sawit yang dikeluarkan oleh pabrik mampu meningkatkan keberlanjutan kelapa sawit pada tingkat industri. Serta penyesuaian data yang digunakan pada masing-masing elemen industri akan memudahkan pemberian label keberlanjutan kelapa sawit di Malaysia. Mengumpulkan sumber dan sistem data di buat pada proses pembuatan data dapat mendukung jaringan suplai berkelanjutan dari sektor lain.

Saragih (2017) melakukan penelitian tentang ketelusuran kelapa sawit berkelanjutan dengan hasil bahwa keberlanjutan kelapa sawit dipengaruhi dua sektor yakni kebun dan pabrik. Kegiatan yang harus diperhatikan untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan adalah dokumen penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Social and

Environmental Impact Assessment (SEIA) analisa High Conservation Values Assessment (HCV) Green House Gas (GHG), Free Prior Informed Consent (FPIC). Pada kegiatan pemeliharaan hal-hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan peta luas lahan legal adat pakai pengolahan tanah gambut dan tata air serta lindungan badan air sempa dan sungai.

2.5 Kerangka Pemikiran

Komoditi kelapa sawit dan turunannya memberikan manfaat ekonomi baik bagi negara maupun masyarakat. Bagi negara ekspor CPO menjadi komoditas unggulan ekspor yang mampu menciptakan devisa dan bagi daerah perkembangan perkebunan kelapa sawit menimbulkan *multiplier effect* pada perekonomian masyarakat. Perkembangan kelapa sawit semakin menjadi primadona petani maupun pengusaha perkebunan. Banyaknya peminat perkebunan kelapa sawit ini sering kali menjadi penyebab alih fungsi lahan. Rendahnya sumberdaya dan pengetahuan membuat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik-praktik tidak ramah lingkungan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit. Dewasa ini sudah saatnya perkebunan kelapa sawit dikelola dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial dan lingkungan yang disebut dengan praktik berkelanjutan.

Indikator pembangunan pertanian berkelanjutan umumnya dilihat dari tiga pilar yakni sosial ekonomi lingkungan namun beberapa ahli menambahkan unsur kelembagaan politik dan teknologi. Pemilihan indikator didasari oleh fenomena permasalahan yang akan dipecahkan oleh analisis tertentu. Arah penelitian mengacu pada tujuan penelitian sehingga penggunaan indikator berkelanjutan ditetapkan dan dirumuskan oleh beberapa dasar pemikiran. Penelitian ini menggunakan lima

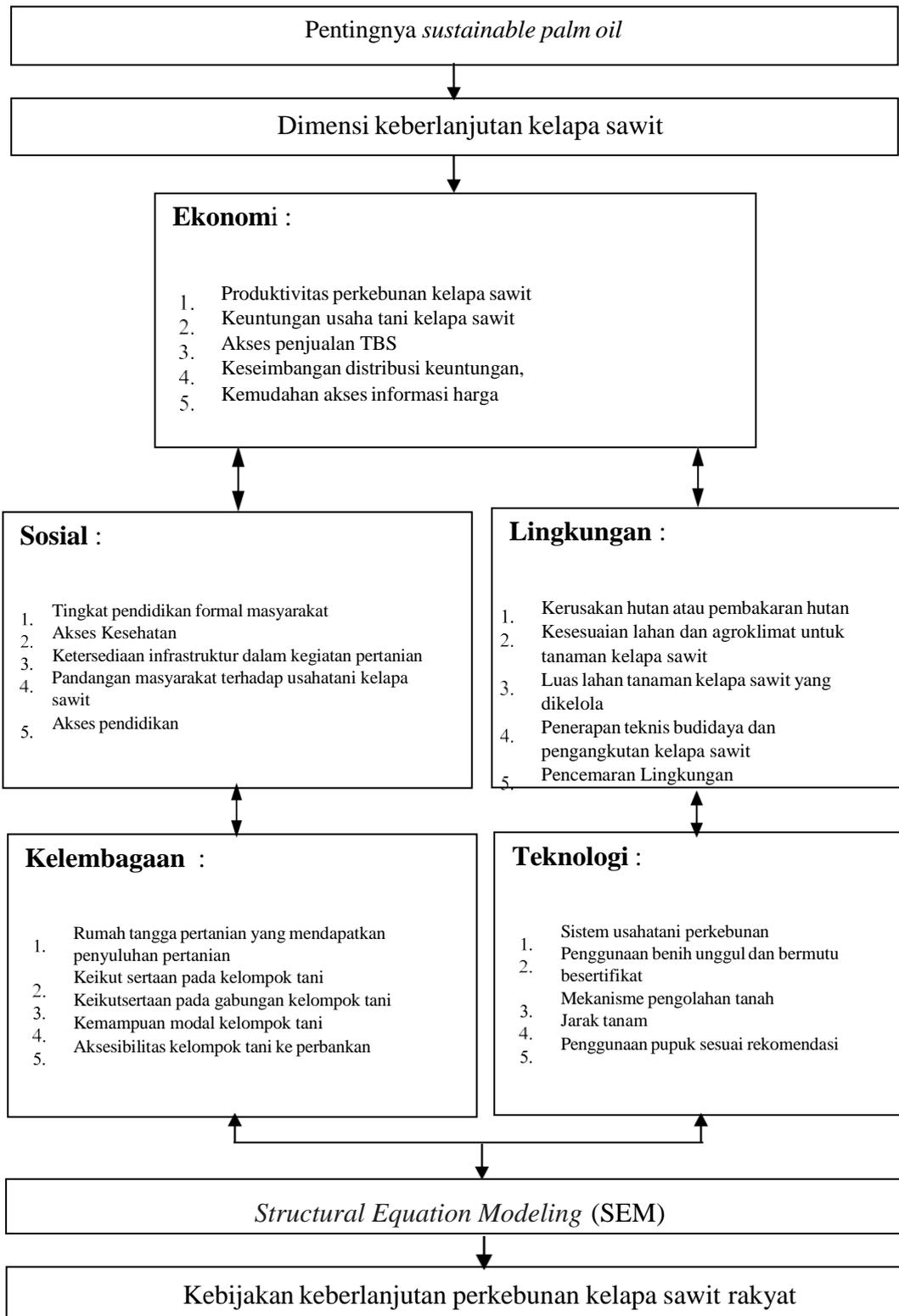
dimensi (indikator keberlanjutan) yakni ekonomi sosial lingkungan Kelembagaan dan teknologi. Pemilihan dimensi tersebut berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah yang akan dijawab pada tujuan penelitian.

Persoalan perkebunan kelapa sawit rakyat didasari pada keterbatasan sumber daya kemampuan dan karakter yang bervariasi hingga rendahnya produktivitas sementara iklim usaha perkebunan kelapa sawit rakyat terus berkembang. Fenomena pergerakan perdagangan CPO juga yang memasuki era eco-labelling mengharuskan produksi kelapa sawit memiliki jaminan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Perkebunan berkelanjutan ditujukan dengan tetap terjaganya kualitas lahan dan keseimbangan ekosistem bersifat adil aman bagi kesehatan petani dan dapat mendorong iklim usaha yang kondusif sertamampu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Namun rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi gambaran utama bahwa praktik perkebunan kelapa sawit skala perkebunan rakyat belum mampu menerapkan *Best Agronomies Practice* pada usahatani perkebunannya. Hal tersebut juga mendasari penelitian ini untuk mengkaji aspek-aspek berkelanjutan pada perkebunan kelapa sawit rakyat.

Permasalahan rendahnya produktivitas pencemaran lingkungan hingga dugaan alih fungsi lahan hutan terhadap perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman bagi keberlanjutan sektor ini. Maka diperlukan analisa yang mampu mengukur sejauh mana aspek-aspek keberlanjutan diterapkan pada budidaya perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini akan menganalisa keberlanjutan perkebunan rakyat dengan lima dimensi yakni sosial ekonomi lingkungan teknologi dan kelembagaan yang diduga berpengaruh pada aspek keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat. Dimensi tersebut akan diuraikan

pada berbagai atribut-atribut yang digunakan untuk mengukur kelima dimensi tersebut. Atribut-atribut didasarkan pada prinsip dan kriteria yang ditetapkan sebagai lembaga penilai status keberlanjutan hasil diskusi dengan pemangku kebijakan perkebunan kelapa sawit rakyat Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada penelitian dilakukan identifikasi faktor keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pemilihan atribut disetiap dimensi dengan penelusuran penelitian terdahulu prinsip dan kriteria Nilai keberlanjutan dianalisis berdasarkan dimensi maupun gabungan seluruh dimensi berdasarkan indeks keberlanjutan yang sudah ditetapkan berdasarkan teori. Penelitian ini juga mampu mengidentifikasi faktor paling sensitif dari atribut- atribut yang telah disusun melalui analisis *leverage*. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) yang akan merepresentasikan indeks keberlanjutan dan indikator kunci (yang paling sensitif) mempengaruhi keberlanjutan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai. Skema kerangka pemikiran operasional pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai